

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi pada hakekatnya, pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual (Todaro, 1998: 19).

Hakekat pembangunan nasional adalah untuk menyatakan kehendak rakyat Indonesia dalam rangka melaksanakan pembangunan menuju terwujudnya suatu masyarakat yang adil dan makmur, bahagia dan sejahtera. Dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan demi terwujudnya perekonomian yang mandiri dan handal berdasarkan demokrasi ekonomi guna meningkatkan kemakmuran rakyat.

Pembangunan daerah dalam jangka panjang terutama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan pembangunan daerah perlu diperhatikan kondisi, potensi dan karakteristik wilayah dengan

mengikutsertakan masyarakat dan perangkat-perangkat pemerintah daerah. Daerah mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan dalam merencanakan pemanfaatan sumber daya, baik yang bersumber dari daerahnya sendiri maupun bantuan dari pemerintah pusat.

Salah satu faktor untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah adalah dengan mengamati seberapa besar pertumbuhan ekonomi (PDRB) yang dicapai oleh daerah tersebut. Mengingat konsep pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebagai tolak ukur penilaian pembangunan daerah, maka erat pula kaitannya dengan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi tersebut. Ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi, antara lain (Arsyad, 1999: 214):

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
3. Kemajuan teknologi.

Kualitas sumber daya manusia sangat berkaitan dengan masalah pembangunan karena sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan suatu bangsa. Terdapat beberapa alasan pembangunan sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam pembangunan nasional. Pertama, adalah semakin dirasa perlunya berorientasi pada nilai tambah dan menghasilkan produksi nasional yang lebih kompetitif dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai upaya memelihara dan meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan.

Kedua, perkembangan yang semakin cepat dan kompleks serta perkembangan globalisasi berupa keterbukaan hubungan antarnegara di bidang ekonomi, industrialisasi, perdagangan, informasi serta kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan untuk menyiapkan sumber daya manusia sejak dini serta meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar menjadi sumber daya manusia yang profesional, kreatif, dan inovatif. Ketiga, proses pembangunan ekonomi Indonesia sekarang ini sedang mengalami masa transisi atau transformasi dari ekonomi yang dipengaruhi oleh budaya agraris kepada ekonomi yang dipengaruhi oleh budaya industri dalam waktu yang relatif singkat. Keempat, adanya keinginan dan komitmen nasional, sebagaimana disebutkan dalam GBHN 1993, bahwa manusia adalah sebagai pelaku dan sekaligus sebagai sasaran pembangunan. Jadi sebagai pelaku pembangunan manusia Indonesia merupakan salah satu faktor produksi yang diharapkan dapat menghasilkan barang dan jasa untuk seluruh masyarakat. (Tjiptoherijanto, 1996: 3).

Investasi merupakan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Pada perekonomian tertutup, sumber dana investasi semata-mata berasal dari tabungan domestik, sedangkan pada perekonomian terbuka sumber dana dapat diperoleh melalui pinjaman luar negeri.

Salah satu instrumen kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan faktor penting yang menentukan penawaran agregatif dan selanjutnya akan mempengaruhi PDB atau PDRB riil. Pengeluaran pemerintah yang berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan

penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta itu sendiri dikategorikan menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan (Kunarjo, 1992:125).

Selain faktor-faktor diatas, terdapat faktor lain yang diduga mempengaruhi proses pertumbuhan, yaitu peranan pemerintah. Hipotesa teori sisi penawaran (*supply side theories*) menyatakan bahwa secara umum, pajak yang ditarik untuk membiayai pengeluaran pemerintah akan mengakibatkan distorsi alokasi sumber-sumber daya yang efisien sehingga pada akhirnya mengurangi tingkat output. Dengan demikian, daerah dengan pertumbuhan proporsi pengeluaran pemerintah dalam output yang besar akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Di lain pihak, pengeluaran konsumsi pemerintah mempunyai dampak positif dalam penyediaan barang dan jasa publik dimana mekanisme pasar gagal mengatasinya (Setiati, 1996: 122).

Perkembangan perekonomian Propinsi DIY sebelum krisis ekonomi terjadi, secara bertahap mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan cukup tinggi terjadi antara tahun 1994-1996 dimana rata-rata per tahunnya mencapai 8%. Tetapi keadaan setelah krisis yang melanda Indonesia, dampaknya telah mempengaruhi kondisi perekonomian di DIY secara langsung. Pertumbuhan ekonomi mengalami guncangan dan terus merosot hingga akhir tahun 1997.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi krisis belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Bahkan keadaan ekonomi semakin terpuruk dan keterpurukan itu mencapai puncaknya pada tahun 1998 yang ditandai dengan terperosoknya kurs rupiah terhadap dollar Amerika dan

menyebabkan banyak perusahaan gulung tikar, terjadi PHK secara besar-besaran. Hal ini mengakibatkan terjadinya gejolak sosial di masyarakat. Dampaknya pada tahun 1998 tersebut, di DIY terjadi kemunduran disektor ekonomi, sehingga laju pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan drastis yaitu mencapai -11.18%.

Kemudian keadaan perekonomian setelah krisis, pada tahun 1999 perkembangan ekonomi di DIY nampaknya sudah mulai menunjukkan gejala ke arah pemulihan ekonomi. Hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi DIY yang menunjukkan angka positif. Pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi DIY berhasil mencapai angka 0.99%. Sebab mulai dari tahun ini sektor ekonomi mulai bangkit dan perekonomian berlangsung pulih sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat secara bertahap walaupun laju pertumbuhannya tidak setinggi sebelum masa krisis.

Perekonomian Propinsi DIY semakin membaik pada tahun 2000. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat cukup signifikan, yaitu sebesar 4.01%. Kemudian pada tahun 2001 dan 2002, perekonomian kembali tumbuh positif dengan angka pertumbuhan masing-masing mencapai 3.28% dan 3.38%. Sedangkan pada tahun 2003, perekonomian DIY tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sekitar 4.81%.

Berpedoman pada uraian diatas, pada kesempatan ini penulis tertarik untuk mengulas dan meneliti bagaimana pertumbuhan pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB), pertumbuhan angkatan kerja terdidik dan pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (PDRB) di DIY, dengan menulis skripsi dengan judul **“SUMBER-SUMBER**

PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Periode 1989-2003”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertumbuhan pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional (PDRB) propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 1989-2003?
2. Bagaimana pertumbuhan angkatan kerja terdidik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional (PDRB) propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 1989-2003?
3. Bagaimana pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional (PDRB) propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 1989-2003?

1.3. Manfaat dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Manfaat

1. Bagi masyarakat akademis

Diharapkan menambah wawasan, pengetahuan serta sarana bagi mahasiswa yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Bagi pemerintah

Dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijaksanaan pembangunan ekonomi daerah terutama yang berkaitan

dengan pengembangan sektor ekonomi dan pengembangan kesempatan kerja demi terciptanya pembangunan yang merata.

1.3.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) terhadap pertumbuhan ekonomi regional (PDRB) propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 1989-2003.
2. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan angkatan kerja terdidik terhadap pertumbuhan ekonomi regional (PDRB) propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 1989-2003.
3. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi regional (PDRB) propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 1989-2003.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan & manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Tinjauan Umum Subjek Penelitian

Bab ini merupakan gambaran secara umum subyek penelitian. Dilakukan dengan merujuk pada fakta yang bersumber pada data yang

bersifat umum sebagai wacana pemahaman secara makro yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III. Kajian Pustaka

Bab ini berisi tentang pendokumentasian dan pengkajian hasil penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama. Dari proses ini ditemukan kelemahan/kekurangan pada penelitian yang lalu sehingga dapat dijelaskan dimana letak hubungan, perbedaan maupun posisi penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu sekaligus dihindari publikasi.

BAB IV. Landasan Teori

Bab ini berisi mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti.

BAB V. Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB VI. Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisis statistik. Kalau ternyata hasil penelitian secara keseluruhan atau sebagian baik sesuai dengan teori ataupun harapan umum yang berlaku, maka peneliti harus memberikan penjelasan mengenai bagaimana hal tersebut dapat terjadi.

BAB VII. Simpulan dan Implikasi

Pada bagian simpulan berisi tentang simpulan-simpulan yang langsung diturunkan dari analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya. Sedang pada bagian implikasi muncul sebagai hasil dari simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah sehingga dari sini dapat ditarik benang merah apa implikasi dari teoritis penelitian ini.

